

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Badu. 2018. *Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Bachtiar, L. (2020). Pengembangan Teknologi Mobile Untuk Sistem Kasir Rumah Makan Di Kota Sampit Menggunakan Firebase Realtime Database. *Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat (JTIULM)*, 5(2), 57-66.
- Bapenda Makassar. 2019. *Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar*.
- Basuki, Johannes, 2018. *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ellitan, Lena dan Lina Anatan. 2009. *Manajemen Inovasi: Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: Alfabeta.
- Githa Safitri, Kadek. 2019. *Inovasi Program Aplikasi Kucata'ki Dalam Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar [skripsi]*. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutiara Iris, Nafira. 2019. *Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Dengan Metode Tapping Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi [skripsi]*. Universitas Hasanuddin. Makassar (ID):
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah